

PERAN POLITIK NU TAHUN 1952-1955

Abdul Mundlir

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
E-mail:Orator.indonesia@gmail.com

Septina Alrianingrum

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Nahdlatul Ulama (NU), adalah organisasi sosial keagamaan (*Jam'iyah*) terbesar di Indonesia. Awal kelahiran NU sendiri tidak dapat dilepaskan dari kehadiran dua faktor utama, yakni realitas ke-Islaman dan realitas ke-Indonesiaan. Realitas ke-Islaman NU lahir sebagai suatu wadah bergabungnya para Ulama dalam memperjuangkan tradisi pemahaman dan pengalaman ajaran Islam yang sesuai dengan kultur Indonesia.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai perjalanan dan peran NU pada tahun 1952-1955 baik dalam bidang politik maupun sosial keagamaan, penulis melakukan serangkaian tahapan penelitian guna mendapatkan hasil deskriptif. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: apa latar belakang perpindahan NU dari Ormas ke Partai Politik dan peran politik NU pada tahun 1952-1955?

Penelitian tentang NU yang selama ini ada hanya membahas aspek secara umum, maka dengan penelitian ini kami berusaha membahas secara spesifik. Hal ini tentunya dapat mengubah persepsi publik yang memandang kajian tentang NU yang selama ini ada hanya membahas kulit luarnya saja, sehingga kurang bisa menggali substansi dari tujuan penelitian serta belum bias menjawab rumusan masalah secara holistik.

Kiprah politik Nahdlatul Ulama pada era 1952-1955 cenderung memposisikan dirinya sebagai partai yang mewakili aspirasi umat Islam, khususnya kaum pesantren. Dengan demikian banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pengurus PBNU agar memenangkan partai NU, dan hasilnya pun nyata bahwa partai NU memperoleh suara yang jauh dari prakiraan dari tim sukses partai NU sendiri. yakni menduduki peringkat ketiga dibawah PNI dan Masyumi. Partai NU mendapatkan suara 6.689.333 (18,47 persen dengan 91 kursi).

Kata kunci: Politik, NU

Abstract

Nahdlatul Ulama (NU), is a religious social organization (Jam'iyah) in Indonesia. NU early birth can not be separated from the presence of two main factors, namely the reality to Islamization and reality to the Indonesian-ness. Reality to the Islamization NU born as a container joining the scholars in the tradition of fighting for the understanding and experience in accordance with the teachings of Islam Indonesian culture.

To learn more about the trip and the role of NU in 1952-1955 in both the political and socio-religious field, the authors conducted a series of steps in order to get the results of descriptive research. The problem of this paper is: what background NU displacement of community organizations to political parties and the political role of NU in 1952-1955?

Research on NU that had been there only discuss general aspects, then with this study we tried to discuss specifics. This of course can change the public perception that sees the study of NU that had been there only discuss skin deep, making it less able to dig up the substance of the research objectives and not biased sevara holistic answer the problem formulation.

Gait NU politics in the era of 1952-1955 tend to position themselves as the party that represents the aspirations of the Muslims, especially the boarding schools. Thus many efforts made by the board in order to win NU NU party, and the results are evident that the NU obtain sound away from the forecasts of the NU's own campaign team. which ranks third under the PNI and Masjumi. Party Brooklyn get sound 6,689,333 (18.47 percent with 91 seats).

Key word: Politic, NU

A. Pendahuluan

Nahdlatul Ulama (NU), adalah organisasi sosial keagamaan (*Jam'iyah*) terbesar di Indonesia. Awal kelahiran NU sendiri tidak dapat dilepaskan dari kehadiran dua faktor utama, yakni realitas ke-Islaman dan realitas ke-Indonesia-an. Realitas ke-Islaman NU lahir sebagai suatu wadah bergabungnya para Ulama dalam memperjuangkan tradisi pemahaman dan pengalaman ajaran Islam yang sesuai dengan kultur Indonesia.

Fenomena keanekaragaman NU tersebut mendorong peneliti NU asal Australia, Greg Barton mengatakan bahwa NU ibarat kapal pesiar yang besar, yang didalamnya terdapat banyak kapal kecil yang berbeda-beda, namun tetap dalam satu wadah.¹ KH. Musthofa Bisri atau yang lebih dikenal dengan Gus Mus mengatakan bahwa NU itu makhluk yang aneh, dikatakan organisasi tapi tidak terorganisir, dikatakan tidak organisasi tapi keberadaannya secara organisatoris ada. Mau dibunuh pimpinannya yang ada di pusat, yang di kalangan bawah tetap ada dan bisa bergerak.² NU identik dengan masyarakat pedesaan yang terkesan kolot dan kuno.

NU pada saat itu tidak mau menerima pembaharuan, bahkan Clifford Geertz mengatakan NU sebagai kelompok yang anti-modernisme dan organisasi kontra pembaharuan. Namun, semua itu tidak benar, karena sesungguhnya hari ini (sejak tahun 1984) NU justru lebih modern dari pada kaum modernisme.³ Pemikiran para ilmuwan NU telah menembus batas tradisi yang dianggapnya suci dan tidak bisa diganggu gugat. Pemikiran NU sejak 1984 mulai lebih banyak mengilhami adanya pemikiran global yang mementingkan kepentingan umat manusia modern.

Sepanjang sejarahnya, NU banyak mengalami berbagai aktivitas organisasi yang sangat fenomenal, mulai dari keikut sertaannya dalam demokrasi parlimenter, demokrasi terpimpin dan menjadi partai politik. Tahun 1971 NU bergabung dengan PPP dan menerima Pancasila sebagai azas organisasinya. Penggabungan NU dalam Ulama NU inilah yang sebelum kelahirannya dikenal sebagai kaum tradisional, yang mewakili kalangan pesantren. Menghidupkan praktek-praktek keagamaan yang diwarisi oleh walisanga. gerakannya lebih banyak di lakukan di desa-desa, menyampaikan pengajian kepada masyarakat awam, pengajaran kitab kuning di Surau, dan melestarikan tradisi Islamisasi lokal yang sudah membudaya. Pesantren ini-lah yang kemudian menjadi cikal bakal kelahiran NU sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama.

Perjalanan NU memulai mengarahkan langkah berperan dalam dunia politik. NU mulai terlibat dalam masalah-masalah politik setelah aktif dalam Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Namun eksistensi MIAI

tidak berlangsung lama karena pada Oktober 1943 MIAI membubarkan diri dan digantikan oleh Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Pada awalnya, Masyumi merupakan sebuah organisasi non politik, tetapi setelah Indonesia merdeka, Masyumi akhirnya merubah visi perjuangannya menjadi partai politik bekerja sama dengan NU dan organisasi ke-Islam-an lainnya sebagai wujud mendukung perjuangan Masyumi.

Tahun 1940-1950, Masyumi akhirnya menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Masyumi merupakan partai yang heterogen anggotanya, sehingga perbedaan kepentingan politik mulai banyak terjadi didalam organisasi politiknya tersebut. Keadaan seperti ini menyebabkan NU keluar dari Masyumi dalam berbagai kegiatan politik. Tahun 1952 NU sebagai ormas mulai memikirkan untuk merubah visi perjuangannya menjadi partai politik yang bernama sama, yaitu NU.

NU sebagai subyek penelitian, dimana posisi NU dalam keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia sangat besar baik secara langsung maupun secara tidak langsung, terutama di dalam sumbangsuhnya pada bidang politik NU mempunyai peran yang besar. Melalui basis massa yang tersebar di pelosok-pelosok desa dan pondok pesantren menjadikan NU seperti sebuah bangunan masyarakat yang unik dan khas bagi peradaban bangsa Indonesia.

Tahun 1955, merupakan tahun pertama Indonesia melakukan pemilihan umum dengan sistem multi partai. Sejak tahun 1952 keputusan NU yang memisahkan diri dari Masyumi dan berdiri sendiri menjadi partai politik, serta keputusannya untuk memilih jalan politik praktis mampu memberi gairah politik NU berhasil sebagai parpol. Setelah menjadi partai politik, NU mengukir sejarah yang monumental, khususnya pada hasil pemilu 1955. NU berhasil mendapatkan suara yang besar dan berhasil memperoleh 45 kursi di Parlemen. Perolehan suara NU tidak hanya terjadi pada pemilu 1955, pada pemilu selanjutnya, yaitu pemilu 1971 NU juga berhasil memperoleh suara yang besar.

Keberhasilan NU ini dinilai karena kemampuan NU menggalang solidaritas di lingkungan kaum Santri, serta adanya dukungan penuh dari basis tradisionalnya. Keberhasilan NU dalam kemenangan pemilu 1955 karena beberapa tokoh-tokohnya memberikan sumbangsuh yang besar dalam dunia Perpolitikan Indonesia.

Alasan memilih judul peran politik NU tahun 1952-1955 karena keberhasilan NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang ketika merubah visi misi organisasi menjadi partai politik NU tetap mendapatkan dukungan dari basis tradisionalnya, NU mampu mempertahankan basis masanya melalui peran dan pengaruh paran Ulama yang dominan di pesantren-pesantren. Setelah menguarikan latar belakang diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut, apa latar belakang perpindahan NU dari Ormas ke Partai Politik dan peran politik NU pada tahun 1952-1955?

¹Lihat Greg Barton. Hal. 23

²Lihat MulK.H.an, dalam politik Santri, hal. 35

³Ibid, hal. 05

B. Pembahasan

Sekitar abad XIII Islam telah berkembang di Sumatra melalui jalur perdagangan. Para pedagang ini tidak hanya melakukan kegiatan ekonomi, namun juga kegiatan pendidikan dan pengajaran, yang diajarkan adalah keyakinan dalam Islam, pengajaran Agama, dan ajaran-ajaran Tarikat Sufi. Beberapa abad kemudian proses ini pun memberikan dampak terhadap hancurnya kerajaan Hindu-Budha yang sedang berkuasa. Satu persatu kerajaan Hindu-Budha kehilangan kekuasaannya.

Proses Islamisasi ini pelan namun pasti menyebar ke seluruh pelosok di Nusantara, termasuk Jawa. Para guru Tarikat dalam menyebarkan agama dan mengajar penduduk pribumi tentang Islam, mendirikan sebuah padepokan yang kemudian disebut dengan pesantren. Awalnya satu pesantren, lalu lahirlah beberapa ribu pesantren di seluruh pelosok-pelosok desa yang dirintis oleh murid dari pesantren pertama yang diajarkan di pesantren adalah Islam Ahlussunnah Wal jama'ah. Yakni Islam yang dalam bidang Fiqh mengikuti Madzhab Imam Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali).

Kelahiran NU tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dalam negeri saja, tapi juga faktor luar negeri. Terutama oleh perubahan peta politik yang ada di dunia Islam. Tahun berdirinya NU adalah tahun dimana dunia perpolitikan sedang kacau-kacaunya. Negara-negara Islam sedang dihadapkan pada permasalahan penjajahan, di Eropa ada ketegangan menyambut perang dunia kedua, dan di Nusantara sendiri masih dicengkram oleh kolonial Belanda.

Sejak kekhalifahan Islam di Turki (Turki Ustmani) digulingkan pada pada tahun 1916 oleh rezim sekuler-nasionalis pimpinan Musthafa kemal Pasha dunia Islam goncang dan mengalami perpecahan yang begitu hebat. Beberapa daerah kekuasaan Turki Ustmani jatuh ke tangan negara-negara kolonial Eropa.⁴ Mesir dan Hijaz berhasil dikuasai Inggris, Armenia dan Yunani berhasil memerdekakan diri, dan lain sebagainya. Puncak goncangan itu semakin hebat tatkala pada tahun 1924 Musthafa Kemal Pasha menghilangkan sistem kekhalifahan dan menggantinya dengan sistem republik, yang memaksa Sultan Abdul Majid (Sultan terakhir) mengungsi ke luar negeri dengan menggunakan kapal Inggris.⁵

Saat kehilangan khalifah itu negara-negara jajahan Inggris dan Belanda kehilangan orientasi dan kiblat kepemimpinan. Muncul gerakan-gerakan untuk kembali menghadirkan sosok khalifah dalam dunia Islam (oleh beberapa kaum pergerakan Islam India).

Syarif Husein penguasa baru Hijaz, yang telah menguasai tanah haram (Makkah) dan kota nabi (Madinah) berusaha mengadakan kongres Khalifah sebagai bentuk sikap untuk mengkampanyekan khalifah yang baru. Dirinya berharap dengan Kongres itu akan terpilih sebagai Khalifah menggantikan Turki Ustmani.

⁴ Ali Haidar. Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia. Al-Maktabah. Surabaya. Hal 45.

⁵ Erik Zürcher. Sejarah Modern Turki. Gramedia. jakarata. 2003. hal 12.

Namun beberapa bulan kemudian, belum sempat kongres itu digelar, musuh politiknya kaum badui pedalaman, Abdullah Ibnu Sa'ud menyerbu Mekkah dan membuyarkan keinginan-keinginannya.⁶

Ibnu Sa'ud adalah pengikut ajaran wahabi yang sangat membenci praktek-praktek keagamaan dengan sistem bermadzhab. Maka tidak mengherankan jika kegiatan Ziarah kubur, Tahlil, Thariqat, dan membaca doa-doa sangat dilarang di Hijaz. Banyak kuburan para syuhada' dan sahabat nabi yang di hilangkan dan dijadikan sebagai tempat kandang unta, benteng, dan juga perluasan istana.

Bersamaan dengan itu, telah ada persiapan-persiapan untuk menyelenggarakan kongres Al-Islam di Mesir oleh Raja Fu'ad atas dorongan para Ulama Al-Azhar. Melihat hal itu, Ibnu Sa'ud pun merasa terancam dengan posisinya yang baru saja direbut. Maka dia mengadakan kongres yang sama seperti yang dilakukan oleh Raja Fu'ad.

Akhirnya kedua Negara itu, baik Hijaz maupun Mesir mengirim undangan ke negara-negara Islam untuk menghadiri Kongres Khalifah yang diadakannya dalam waktu bersamaan. Termasuk yang mendapatkan Undangan adalah Hindia Belanda. Kongres itu dijadwalkan pada tahun 1926.

Pada waktu itu pula di Hindia Belanda juga sedang gencar-gencarnya di adakan Kongres Al-Islam (antara tahun 1922-1926), yang diselenggarakan sebagai jawaban untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi umat Islam Indonesia. Dalam kongres ini pula Umat Islam menetapkan utusan yang akan berangkat ke kongres khalifah itu. Namun undangan yang didatangi oleh Muslim Indonesia adalah ke Hijaz. Serikat Islam (salah satu peserta kongres Al-Islam) mencurigai Kongres kairo sebagai rekayasa Inggris untuk menguasai dunia Islam. Berbeda dengan Muhammadiyah yang memilih Hijaz karena ada kesamaan ideologi sebagai pengikut Wahabi.⁷

Adapun kaum tradisionalis, yang mewakili ulama pesantren Indonesia juga cenderung memilih Hijaz, dengan alasan bahwa persoalan agama itu lebih penting dari pada persoalan politik atau khalifah. Hijaz adalah pusat belajar umat Islam di Nusantara, terutama pendidikan dengan system bermadzhab. Jika semua praktek sistem bermadzhab dihapus, tentu hal ini akan mengancam eksistensi umat Islam pesantren di Indonesia yang menganut sistem bermadzhab. Disini nampak bahwa kaum tradisionalis lebih menitik beratkan pada kenyamanan dalam beribadah dari pada unsur yang lainnya.⁸

Saat menentukan utusan ke kongres Khalifah di Makah pada awalnya yang akan berangkat mewakili umat Islam Indonesia adalah HOS Cokroaminoto dari serikat Islam, K.H. Mas Mansor dari Muhammadiyah, dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah dari kalangan ulama

⁶ Ali Haidar. NU dan Islam di Indonesia. Almaktabah .Surabaya. hal. 71.

⁷ Nur Khalik Ridlwan, NU dan Bangsa 1914-2011. Arruzz Media Jogja. Hal 41.

⁸ Ali Haidar, NU dan Islam di Indonesia. Almaktabah Surabaya. hal.57

tradisionalis. Namun karena ada siasat licik dari beberapa kalangan yang membenci kaum tradisionalis akhirnya dengan alasan “tidak mewakili organisasi tertentu” kaum tradisionalis tidak diizinkan untuk menjadi wakil dari umat Islam Indonesia. Lebih parahnya lagi, diluar utusan dari kongres Al-Islam itu kaum pembaharu (yang membenci kaum tradisionalis) juga mengirimkan utusannya, yakni pembaharu terkenal yang bernama Abdul Karim Amrullah dan Abdullah Ahmad.⁹

Situasi ini tentu membahayakan posisi kaum tradisionalis, karena tidak ada satu pun wakilnya yang akan menghadiri kongres khalifah di Makkah. Para kiai khawatir bahwa semua praktek keagamaan dengan sistem bermadzhab di Mekkah sepenuhnya akan dihilangkan, dan tentu saja akan berdampak pada praktek keagamaan di seluruh dunia Islam.

Para Ulama pesantren pun akhirnya sadar bahwa diperlukanlah sebuah wadah untuk mengakumulasi aspirasi ulama dari kalangan tradisionalis. Maka di bentuklah *komite Hijaz* yang mempunyai tujuan untuk menyampaikan aspirasi para Ulama pesantren di Nusantara kepada raja Ibnu Sa’ud sang penguasa Hijaz dan Nejad.

Awalnya, dalam kongres NU di Purwokerto tahun 1946 diserukan agar “warga NU membanjiri partai politik Masyumi dan diputuskan NU akan menjadi tulang punggung Masyumi.”¹⁰ Perbedaan kepentingan politik antar berbagai kelompok dalam Masyumi kemudian segera menyusul. Persatuan yang sejak awal kemerdekaan dengan menjadikan Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam tidak dapat dipertahankan lagi. Segera saja pengaruh politik praktis berupa distribusi kekuasaan menjadi ajang perebutan. Keputusan PSII mendirikan partai kembali partai tahun 1947 itu setelah dibekukan Jepang sebelumnya dan NU keluar dari Masyumi tahun 1952 untuk sebagian juga dipengaruhi alasan-alasan ini, selain barangkali pertentangan lama ketika organisasi-organisasi Islam berselisih paham pada tahun 30-an yang muncul kembali.¹¹

Semula keterikatan NU dalam Masyumi masih dapat dipertahankan meskipun PSII telah keluar. Akan tetapi dengan demikian peristiwa ini ibarat menyulut api dalam sekam. Ketidakmampuan pemimpin Masyumi melakukan negosiasi dan kompromi-kompromi antara sesama kawan, mempercepat api perpecahan.¹²

Kondisi lemahnya persatuan Islam sebenarnya sudah terjadi sejak sebelum kemerdekaan, bahkan pada dekade-dekade sebelumnya. Faktor ini tampaknya kurang diperhatikan ketika mula pertama partai Masyumi didirikan. Struktur keanggotaan Masyumi yang mendua, terdiri atas anggota organisasi dan perorangan, tidak

memperlancar dilakukannya negosiasi dalam mengatasi berbagai kepentingan yang timbul.

Kebijakan politik Masyumi sering dipengaruhi oleh faktor individu pengurusnya sehingga menjadi pemicu perpecahan didalam organisasi Masyumi. Ketika pada tanggal 3 Juli 1947 dibentuk kabinet Amir Syarifudin, Masyumi menolak ikut serta, tetapi PSII yang menjadi bagian dari Masyumi justru dibawah pimpinan Arudji Kartawinata ada beberapa anggota PSII menjadi anggota kabinet dengan menempatkan wakilnya.¹³ Mulanya Masyumi memboikot kabinet tetapi empat bulan kemudian memasukkan wakilnya bahkan sebagai wakil perdana menteri. Penolakan Masyumi terhadap kabinet Amir Syarifudin tampaknya tidak didasarkan pada kebijakan politik yang strategis, tetapi hanya karena adanya dua kubu didalam Masyumi, sebagian bersikap keras dan sebagian lagi bersikap lunak.

NU keluar dari Masyumi diputuskan dalam kongres ke 19, April 1952 di Palembang. Segera saja ucapan itu diprotes delegasi yang mewakili NU agar ditarik kembali. Keputusan itu terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhi antara lain hubungan antara pemimpin NU dengan Masyumi kurang serasi. Umumnya politisi dan pemimpin NU terdiri atas ulama atau tenaga lain keluaran pesantren, walaupun ada yang berpendidikan model Barat, seperti Zainul Arifin dan Muchammad Ijas, jumlahnya tidak banyak. Sementara sebagian kalangan Masyumi memandang rendah lulusan pesantren, juga memandang rendah pemimpin NU.¹⁴

Pada sisi lain NU merasa perkembangan organisasinya sendiri telah mengalami kemajuan yang pesat. Banyak ulama muda lulusan pesantren yang memperoleh kemajuan kemudian memusatkan pengembangan karir mereka dalam politik. pertumbuhan ini memerlukan ruang gerak yang cukup luas, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Ruang gerak akan terbuka luas bila NU berdiri sebagai partai politik.

Sesungguhnya perselisihan itu dapat pula dilihat dari sisi lain yaitu perbedaan prespektif keagamaan. Menurut pernyataan NU sejak lahir tahun 1949 struktur organisasi Masyumi telah diubah sedemikian rupa sehingga Majelis Syura bukan lagi tempat yang penting bagi ulama karena majelis itu tidak lagi dijadikan sebagai badan legeslatif melainkan hanya sebagai badan penasehat belakadan segala persoalan hanya dilihat dari jurusan politik saja tidak lagi mengambil pedoman agama.

Upaya yang dilakukan oleh NU untuk mengembalikan wibawa Majelis Syura tidak berhasil. Menurut NU dewan Pimpinan Partai Masyumi terlalu tenggelam dalam soal-soal politik, melupakan kepentingan Islam yang saat itu menghadapi cobaan yang berat. Memang agak sulit peran semacam lembaga Majelis Syura Masyumi dapat efektif seperti lembaga Syuriah NU karena perbedaan tradisi keduanya. Lembaga Syuriah NU memang cukup efektif mengendalikan organisasi NU karena akar kelahiran NU

⁹ Ibid,

¹⁰ Martin Van Bruinessen. *NU Tradisi relasi-relasi kuasa dan Pencarian makna Baru*. Jogjakarta: Lkis. 2009. Halaman 55.

¹¹ Ibid, 59.

¹² Nur Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz. 2010. Halaman 110.

¹³ Ibid, 135.

¹⁴ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967*. Jogjakarta: Lkis. 2009. Halaman 134.

dimotori oleh ulama-ulama dan kuatnya pengaruh pesantren di dalamnya. Barangkali NU mengharapkan Majelis Syura Masyumi dapat berfungsi seperti Syuriah NU. Tentu hal ini sulit dilaksanakan sebab di dalam Masyumi terdiri dari aneka ragam tradisi yang belum tentu sejalan dengan NU. Berbagai faktor di ataslah yang menjadi penyebab NU keluar dari tubuh Masyumi.

Setelah kurang mendapatkan pelayanan yang semestinya di tubuh Masyumi dalam porsi politik, akhirnya NU membuat keputusan yang sangat kontroversial di zamannya sebagai organisasi kaum sarungan. Tepat pada Mukhtar ke-18 pada Mei 1950 Jakarta NU mulai memutuskan untuk keluar dari Masyumi, namun keinginan tersebut masih dalam tahap ditangguhkan. Dalam Mukhtar 1950 memutuskan KH Wahab Hasbullah sebagai ro'is syuriah menggantikan KH Hasyim Asy'ari yang telah berpulang ke rahmatullah pada 25 Juli 1947. Namun keputusan untuk menjadi partai sendiri itu dimantapkan pada muktamar ke-19 di Palembang.¹⁵

Keputusan sebagai Partai diwujudkan secara nyata pada 31 Juli 1952, bahwa NU benar-benar keluar dari Federasi Masyumi.¹⁶ Penarikan ini sebelumnya telah didahului oleh keluarnya PSII. Dengan keluar dalam federasi Masyumi praktis para tokoh-tokoh NU yang aktif di Masyumi ditarik untuk membesarkan Partai NU, diantaranya KH Wahab Hasbullah, KH Wahid Hasyim, KH Masykur dan juga KH Zainul Arifin. Dan ketika Parlemen bersidang pada 17 September 1952, tujuh anggota parlemen dari NU menarik diri dari Masyumi dan membentuk fraksi sendiri, yaitu Fraksi NU. Mereka diantaranya adalah AA Achsin, Saleh Surjoningsprojo, AS. Bachmid, Idham Chalid, Mochammad Ilias, RT. Moch. KH. Wahab Hasbullah dan KH Zainul Arifin.¹⁷

Hal yang sangat menonjol dalam keputusan NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai sendiri adalah akibat dari perbedaan yang sangat tajam antara KH Wahab Hasbullah dengan M. Natsir, dari kelompok pembaharu. M. Natsir sangat keras kepala, ia tidak memberikan konsesi kementerian Agama kepada NU; sedangkan KH Wahab Hasbullah menganggap bahwa massa NU sangat besar dan sangat membantu membesarkan Masyumi sebagai partai politik. Namun jauh lebih dari itu, sebenarnya sudah banyak bermunculan gelombang anti-Masyumi di cabang-cabang, akibat dari perilaku dari kelompok pembaharu yang sangat tidak menghargai kepentingan NU.

Beberapa waktu sebelum keluar dari Masyumi, KH A. Wahid Hasyim selaku Ketua Muda PBNU telah banyak melakukan kegiatan prakondisi. Perkembangan politik dalam tubuh Masyumi senantiasa disampaikan kepada para tokoh NU baik di daerah maupun di pusat. Maksudnya agar mereka juga ikut menilai, memikirkan dan kemudian menentukan sikap. Puncak pra-kondisi itu ditandai dengan berkumpulnya tokoh-tokoh NU se-Jawa dan Madura di kediaman KH Maksud Khalil, Jagalan-Jombang, awal April 1952. Berbagai persoalan telah

dibahas dan akhirnya diputuskan : "Secara organisatoris NU memisahkan diri dari Masyumi, dan mengusahakan kepada Masyumi agar segera mengadakan re-organisasi untuk menjadikan dirinya sebagai badan federasi."¹⁸

tenaga terampil di bidang politik. Dan tentu saja tenaga terampil harus beragama Islam dan berhaluan dari empat mazhab atau menganut paham Ahlulsunah wal Jama'ah. Selain itu, tenaga terampil ini harus juga memiliki ketaatan kepada para ulama, meski ketaatan itu hanya bersifat formal. Seperti tampilnya H. Djamiluddin Malik yang memprakasai, dan akhirnya NU menyetujui berdirinya Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia (LESBUMI), yang bertugas memelihara seni budaya muslim, dan berperan mencegah berkembangnya seni budaya yang ditangani kelompok Komunis atau PKI.¹⁹

Selain itu ada Idham Chalid, yang dikenal sebagai orang yang strategi, kepala dingin, cermat dan teliti dalam berpolitik, pandai bergaul dan bisa hidup disegala zaman dan aktif dalam mengambil bagian di dalam partai NU, dan berhasil menduduki posisi ketua MA'arif NU pada tahun 1952. Karena potensinya dalam berpolitik sangat menonjol, pada Mukhtar ke-21 di Medan, Desember 1956, ia terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Ciri khusus dalam usaha rekrutmen ini adalah tanpa melihat latar belakang social maupun pendidikannya. Yang penting, tenaga yang diambil mau taat dan patuh kepada kepemimpinan Syuriah.²⁰

Setelah kesulitan pertama teratasi, NU segera mengalihkan perhatiannya kepada persoalan konsolidasi dan penyelamatan eksistensi partai, baik yang ada hubungannya dengan keanggotaan Parlemen maupun keikutsertaannya di dalam Kabinet. Selain itu, NU berusaha menggalang persatuan barisan Islam untuk berjuang bersama demi agama, Negara dan bangsa. Namun, sikap hati-hati dan penuh pertimbangan masih tercermin dalam segala tingkah laku politik NU di masa pertumbuhannya.²¹

Dengan segala pertimbangan yang mendalam, setelah NU resmi menjadi partai politik, para anggota NU yang duduk di Parlemen RI segera mengadakan reaksi politik. Delapan anggota fraksi Masyumi (dari NU) secara sukarela membentuk fraksi tersendiri, yakni fraksi NU. Mereka itu adalah KH Wahab Hasbullah, KH Muhammad Ilyas, Muhammad Saleh Suryaningprojo, Muhammad Ali Prataningkusumo, A. A. Achsin, Idham Chalid, As. Bamid dan Zainul Arifin (kemudian diganti oleh Saifudin Zuhri).²²

Dengan memutuskan untuk memisahkan diri dari Masyumi dan menjadi partai sendiri maka PBNU segera melakukan banyak perubahan terkait dengan AD/ART-nya, karena komponen inilah yang kemudian menjadi langkah nyata PBNU dalam menata anggotanya untuk menghadapi Pemilu 1955 yang diadakan pertama kali

¹⁸Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama Sejarah NU 1952-1967*. Jogjakarta: Lkis. 2009. Halaman 116.

¹⁹Ibid, 197.

²⁰Ibid, 198.

²¹Ibid, 198.

²²Ibid, 198.

¹⁵Ibid, 124.

¹⁶Ibid, 125.

¹⁷Ibid, 126.

oleh Indonesia. Mukhtar ke-19 di Palembang benar-benar menjadi titik pijak bagi NU untuk melangkah menentukan nasibnya tanpa harus bergandeng renteng dengan Masyumi.²³

Adapun untuk memahami Orientasi politik NU secara lebih jelas dan secara global, hendaknya terlebih dahulu kita membaca bagaimana NU berjalan dalam sebuah periodisasi yang telah dijabarkan oleh Martin van Bruinessen. *Periode pertama 1926-1942*, tentu saja pada masa Indonesia masih dalam cengkaman kolonial Belanda. Pada masa-masa inilah NU *abstain* dari dunia politik. Semua gerakannya murni untuk mengembangkan, melestarikan, dan mempertahankan ajaran Islam *Ahlussunnah wal jama'ah*, melalui pengajian-pengajian umum, pengajaran agama, dan juga diskusi-diskusi di beberapa pesantren. Pada masa ini pula para pemimpin NU menggagas berdirinya MIAI (Majlis Islam 'Ala Indoensia) sebagai wadah perkumpulan seluruh organisasi umat Islam.²⁴

Periode kedua 1942-1945, yakni pada masa pendudukan Jepang. Pada masa inilah NU sudah mulai terlibat dalam dunia politik. Para pemimpin NU banyak dilibatkan oleh Jepang dalam mengurus *Shumubu*, kantor urusan agama (cikal bakal berdirinya Departemen Agama). Beberapa pemuda NU juga aktif di barisan Hizbullah dan Sabilillah, sayap militer organisasi Islam, yang murni mencita-citakan adanya kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Sayap militer ini berbeda dengan PETA yang dirancang untuk membantu Jepang dalam perang pasifik. Bahkan para tokoh-tokoh NU adalah komandan dan pimpinan tertinggi dalam Hizbullah dan Sabilillah.²⁵

Periode ketiga 1945-1949, yakni masa perang kemerdekaan. Pada masa ini NU terlibat secara aktif dan radikal dalam politik. Melawan tentara sekutu dengan sayap militernya yang sudah lama terbentuk, para santri dan pemuda NU bergabung dengan Hizbullah dan Sabilillah, memakai jimat dan senjata apa adanya untuk melawan Belanda. Pada masa ini pula NU mengeluarkan "Resolusi Jihad" sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan yang akan mencengkram Indonesia. NU juga mengkritik keputusan pemerintah yang menandatangani perjanjian Linggarjati dan Renville dengan Belanda (yang sangat merugikan Indonesia).²⁶

Sikap ini jauh berbeda dengan sikapnya saat Indonesia masih dalam penjajahan Belanda dimana NU sama sekali tidak menyentuh persoalan politik. Sikapnya memuji-muji pemerintahan Hindia Belanda karena membiarkan terlaksananya ajaran Islam secara penuh di bumi Indonesia.

Bergabung dengan organisasi-organisasi Islam lainnya membentuk Masyumi yang kemudian menjadi partainya umat Islam. Namun NU banyak mengalami

kekecewaan di dalam Masyumi yang akhirnya membentuk partai sendiri.

Periode keempat 1949-1959, yakni masa diterapkannya demokrasi Parlementer. NU banyak mengalami ketegangan dengan kelompok modernis di tubuh Masyumi, terutama saat kepemimpinan dipegang oleh Natsir. NU pun keluar dari Masyumi dan berubah menjadi partai pada tahun 1952. Pada pemilu pertama Tahun 1955 NU mampu menjadi pemenang ke tiga di bawah PNI dan Masyumi. Sehingga banyak pemimpin NU yang duduk di parlemen dan menjadi menteri.²⁷

Periode kelima 1959-1965, yakni masa diterapkannya demokrasi terpimpinnya Soekarno. NU ikut bergabung dalam konsep Nasakomnya Soekarno. Pada masa inilah NU harus berjuang sendirian sebagai kelompok Islam di dalam kabinet gotong royong melawan kelompok nasionalis dan komunis.²⁸

Periode keenam 1965-1966, yakni masa transisi yang keras. Masa ini bisa dikatakan sebagai masa penggayangan kaum komunis. Para pemuda NU (Ansor) terlibat bentrok secara fisik dengan kelompok pemuda komunis. Di beberapa daerah di Jawa timur dan Jawa Tengah NU dan PKI saling bunuh. Masa ini juga merupakan masa berakhirnya rezim orde lama-nya Soekarno.²⁹

Periode ketujuh 1967-1984, yakni masa orde barunya Soeharto. NU terus berkembang menjadi partai Ahlussunnah wal jama'ah, dukungannya terus bertambah, cabang-cabang berdiri di daerah yang bukan mayoritas NU sehingga menimbulkan ketakutan bagi pemerintahan orde baru.³⁰

Dari sinilah kemudian kelihatan bahwa orientasi politik NU adalah jelas, yakni mengembangkan, mempertahankan, menyebarkan dan melestarikan ajaran Islam yang berhaluan ahlussunnah waljama'ah dalam konteks negara kesatuan Indonesia. Dengan demikian maka NU merupakan bagian integral masyarakat Indonesia yang tetap menginginkan tegaknya NKRI dan ajaran islam yang menganut madzhab empat, Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali.³¹ Sehingga khusus pada tahun 1952-1955 NU senantiasa memperjuangkan orientasi tersebut melalui gerakan-gerakan politiknya di Parlemen dan Partai politik.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam AD/ART-nya setelah NU menyatakan diri keluar dari Masyumi, NU yang sudah menjadi Partai Politik ternyata masih gandrung pada persatuan ummat Islam Indonesia. Untuk itu NU mengadakan kontak dengan PSII dan PERTI membentuk sebuah badan yang berbentuk federasi dengan tujuan untuk membentuk masyarakat Islamiyah yang sesuai dengan hukum-hukum Allah dan sunnah Rasulullah saw. Gagasan NU ini mendapat tanggapan yang positif dari PSII dan PERTI, sehingga

²³ Sebagaimana yang telah dijabarkan oleh Maksom Machfoedz dalam *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*, Surabaya: 1983. Hal, 90.

²⁴ Martin van Bruinessen, NU tradisi, relasi-relasi kuasa, pencarian wacana baru, Lkis jogja, 2009. Hal. 42.

²⁵ Ibid, 46

²⁶ Ibid, 51

²⁷ Ibid, 55

²⁸ Ibid, 57

²⁹ Ibid, 62

³⁰ Ibid, 79

³¹ Jamal Ghofir. Biografi Singkat Ulama pejuang Ahlussunnah waljama'ah. Jogjakarta: Aura Pustaka. 2012. Halaman 45.

pada tanggal 30 Agustus 1952 diadakan pertemuan yang mengambil tempat di gedung Parlemen RI di Jakarta, lahirlah Liga Muslimin Indonesia yang anggotanya terdiri dari NU, PSII, PERTI dan Darud Dakwah Wal Irsyad.³²

Kiprah NU dalam mempersiapkan diri untuk terjun dalam dunia politik praktis tidak berhenti pada federasi liga muslimin saja, sebelum menjelang pemilu, NU kembali berusaha melakukan berbagai upaya politik untuk merealisasikan berbagai langkah-langkahnya, contoh salah satu langkahnya NU adalah kegigihan NU dalam berkampanye melawan PKI ketika partai komunis hendak menggunakan gambar “palu arit”, dengan tambahan kalimat “PKI dan orang-orang tak berpartai”. Idham Chalid dari NU yang bertugas sebagai juru bicara memprotes rencana PKI itu dan berhasil menggagalkannya. Dan DN. Aidit, Ketua CC PKI, pernah membujuk agar Idham mau menerima rencana tersebut, tetapi Idham tidak menolaknya.³³

Dalam menghadapi pemilu yang pertama inilah NU sebagai salah satu konstantan partai politik melakukan banyak strategi yang diharapkan mampu mendulang suara yang maksimal bagi partai. Dan secara garis besar strategi NU dilakukan di tiga tingkatan, yakni tingkat lokal, tingkat regional, dan tingkat Nasional.

Selama masa-masa kampanye para pengurus PBNU banyak melakukan koordinasi dengan anggotanya. Dan berbagai upaya-upaya legitimasi keagamaan dilakukan oleh tokoh-tokoh NU. pada bulan Mei 1953, NU membentuk panitia yang khusus untuk menangani pemilu, yakni Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama (Lapunu). Lapunu bertanggungjawab secara total segala kebutuhan NU dalam menghadapi pemilu, diantaranya mengatur logistik, menata formasi caleg, menyiapkan metode kampanye, menyiapkan segala kebutuhan, sehingga penghitungan suara dan perolehan suara yang telah diperoleh oleh setiap cabang. Lapunu pada era awal ini diketuai oleh Saleh Surjaningprodjo.³⁴

Khusus dalam upaya untuk menarik simpati bagi kalangan Islam tradisional NU mengangkat tema ahlusunnah waljama'ah. Pesan tersebut mempunyai dua tujuan, pertama, walaupun hampir semua umat Islam di Indonesia menganggap dirinya termasuk golongan ahlussunnah waljama'ah, kaum tradisional cenderung menganggap dirinya sebagai satu-satunya golongan ini. Dengan demikian, walaupun slogan-slogan tersebut mempunyai daya tarik partisan yang kuat dikalangan tradisional, NU juga berharap dapat memikat mereka yang bukan tradisional. Siasat tersebut seperti hal yang telah disampaikan oleh Wahab Hasbullah dalam kampanye awal kampanye tahun 1955.³⁵

Di antara partai-partai yang berideologi Islam, seperti NU, Masjumi, PSII, Perti, dan PTTI, NU berjuang atas dasar ahlussunnah waljama'ah, sedang partai-partai

Islam atau nasionalis lainnya adalah partai-partai yang tidak bermadzhab. Hal ini memudahkan NU untuk menggalang massa dari kalangan pesantren tradisional.

Pemilihan Umum Indonesia 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia dandiadakan secara serentak diseluruh Indonesia. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis karena melibatkan seluruh elemen masyarakat yang secara ideologis berbeda-beda sekaligus menggunakan sistem multipartai.

Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya berlangsung aman.³⁶

Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota MPR dan Konstituante. Jumlah kursi MPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi Konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi MPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Memasuki babak baru dalam pemilihan umum pertama di Indonesia kerja keras para pemimpin NU tidak sia-sia. Hasil pemilu 1955 menunjukkan, NU berhasil keluar sebagai empat besar setelah Masyumi dan PNI. NU berhasil mendapatkan sebanyak 6.955.141 suara,³⁷ sehingga jumlah kursi di Parlemen yang semasa bergabung dengan Masyumi hanya 8 kursi, melonjak menjadi 45 kursi. Keberhasilan NU dalam pemilu ini tentu saja mengubah peta politik Indonesia. Di dalam Parlemen, partai-partai Islam telah menduduki 114 kursi dari 257 kursi yang telah diperebutkan. Masyumi mendapat 57, NU 45, PSII 8 dan PERTI 4.³⁸

Di dalam Kabinet, dari 25 Menteri yang diperebutkan, 13 diantaranya berhasil diduduki partai-partai Islam. Masyumi 5 orang Menteri, PSII 2 orang Menteri, PERTI seorang Menteri dan NU menduduki 5 orang Menteri. Jabatan menteri yang diduduki oleh NU adalah Wakil Perdana Menteri (KH. Idham Chalid), Menteri Dalam Negeri (Mr. Sunaryo), Menteri Perekonomian (Mr. Burhanuddin Harahap), Menteri Sosial (KH. Fattah Yasin), dan Menteri Agama (KH. M. Ilyas).³⁹

Pemilu 1955 dilaksanakan pada tanggal 29 september 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada

³²Maksoem mahfoedz. *Kebangkitan ulama dan bangkitnya ulama*. Surabaya. Yayasan kesatuan ummat. 1982. Halaman 99

³³Ibid, 201.

³⁴Greag Fealy. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Jogjakarta: Lkis. 179

³⁵ibid

³⁶Nur Khalid Ridwan. *NU dan Bangsa 1910-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz. 2010. Halaman 124.

³⁷Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama sejarah NU 1952-1967*. Jogjakarta: Lkis. 2009. Halaman 199.14

³⁸Ibid, 2401.7

³⁹Ibid, 2167.8

tanggal 15 desember 1955 untuk memilih dewan konstituante dengan hasil sebagai berikut:

Hasil dari pemilu 1955 ini menunjukkan 6 besar partai politik yang mendapatkan suara 1 juta keatas, diantaranya PNI (Partai Nasional Indonesia) mendapatkan 8.434.653 (22, 32 % dengan 57 kursi), Masyumi mendapatkan suara 7.903.886 (20,92 persen dengan 57 kursi), partai NU mendapatkan suara 6.955.141 (18,41 persen dengan 45 kursi), Partai Komunis Indonesia (PKI) mendapatkan suara 6.179.914 (16,36 persen dengan 39 kursi), dan partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) mendapatkan suara 1.091.160 (2,89 persen dengan 8 kursi).

Sedangkan pemilu kedua adalah untuk memilih anggota Dewan konstituante dilakukan ada 15 Desember 1955. Jumlah anggota kontituante dipilih sebanyak 520 kursi, tetapi di Irian Barat yang dipilih jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514 kursi. Hasil pemilihan anggota Dewan Kontituante menunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI meningkat dukungannya, sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR.

Peserta pemilihan anggota konstituante yang mendapatkan kursi itu antara lain PNI mendapatkan suara 9.070.218 (23,97 persen dengan 119 kursi), Masyumi mendapatkan suara 7.789.619 (20,59 persen dengan 112 kursi), Nahdlatul Ulama mendapatkan suara 6.689.333 (18,47 persen dengan 91 kursi), PKI mendapatkan suara 6.232.512 (16,47 persen dengan 80 kursi) dan PSII mendapatkan suara 1.059.922 (2,80 persen dengan 16 kursi), sedangkan lain-lainnya direbut partai kecil. Keberhasilan Nahdlatul Ulama yang menempati urutan ketiga besar dalam pemilihan umum pertama ini mengejutkan banyak pihak, terutama kalangan Masyumi. Pada awalnya Masyumi sangat tidak percaya bahwa NU akan menjadi Partai pada jajaran 6 besar, bahkan di kalangan NU sendiri tidak percaya akan keberhasilan yang dicapainya. Saat itu NU dijuluki sebagai partai sandal jepit.

Pada Pemilu Konstituante NU juga mendapatkan suara yang sangat signifikan. Secara Nasional suara NU telah mencapai 6.989.333. Di Jawa Timur dan Jawa Tengah NU tetap menjadi dominasi dengan masih mendapatkan suara 3.206.392 dan 1.822.902. Sedangkan di daerah yang lain NU dibidang lumayan dan mampu memberikan "perlawanan" yang cukup menunjukkan bahwa kekuatan NU tidak bisa dianggap remeh.

Setelah pemilu 1955, NU berhasil keluar sebagai partai besar sehingga NU akan menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perjuangan. Sebab kabinet yang disusun berdasarkan hasil pemilu 1955 yaitu kabinet Alisostromoamijoyo II atau dikenal dengan kabinet Ali-Roem-Idham merupakan kabinet koalisi besar antara partai PNI-Masyumi-NU sehingga pada masa inilah NU akan mengalami trasi dari masa pertumbuhan ke masa Perjuangan.⁴⁰

⁴⁰ Choirul anam. *Pertumbuhan & perkembangan NU*. Duta aksara mulia. Surabaya. 1985. Hal 272

C. Penutup

Berdasarkan pada penelitian yang peneliti lakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan ang akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang peneliti ajukan pada bab pertama, antara lain; Latar belakang kiprah politik Nahdlatul Ulama pada era 1952-1955 didasarkan atas kekecewaan para elit NU yang tidak lagi satu suara dengan Masyumi sebagai gudang aspirasi umat Islam Indonesia. Masyumi, bagi NU tidak lagi efektif sebagai medan perjuangan dalam upaya menegakkan faham ahlussunnah waljama'ah. Hal itu dibuktikan dengan struktur kepengurusan NU yang tidak lagi menempatkan ulama dalam jajaran tertinggi kepengurusan partai. Selain itu, perpecahan di tubuh Masyumi juga mendorong NU untuk melakukan evaluasi bahwa Masyumi tidak lagi memiliki satu visi dalam menafsirkan Islam. Perpecahan itu terbelah menjadi kelompok radikal dan kelompok moderat. NU masuk dalam kelompok moderat yang sangat berseberangan dengan kelompok Natsir yang cenderung radikal.

Kiprah politik Nahdlatul Ulama pada era 1952-1955 cenderung memposisikan dirinya sebagai partai yang mewakili aspirasi umat Islam, khususnya kaum pesantren. Dengan demikian banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pengurus PBNU agar memenangkan partai NU, dan hasilnya pun nyata bahwa partai NU memperoleh suara yang jauh dari prakiraan dari tim sukses partai NU sendiri. yakni menduduki peringkat ketiga dibawah PNI dan Masyumi. Partai NU mendapatkan suara 6.689.333 (18,47 persen dengan 91 kursi).

Adapun Peran yang dilakukan oleh tokoh NU dalam politik NU tahun 1952-1955 adalah memberikan sumbangsih secara langsung bagi keberlangsungan tata negara kesatuan Republik Indonesia yang saat itu masih lemah dan baru saja melaksanakan pemilu pertamanya. Dalam era 1952-1955 itu banyak para tokoh NU yang duduk dalam jajaran pemerintahan, diantaranya adalah KH. Abdul Wahab Hasbullah, KH. Wahid Hasyim, H. Djamaluddin Malik, A. A. Achsin, dan Muhammad Ilyas.

Dengan demikian berdasarkan simpulan yang peneliti temukan maka ada beberapa saran yang peneliti rekomendasikan agar dijadikan sebagai tindakan lanjutan atas penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu;

Banyak penelitian tentang NU yang dilakukan oleh para peneliti, baik yang datang dari luar negeri maupun peneliti dari dalam negeri. Akan tetapi penelitian-penelitian tersebut masih bersifat panjang lebar, belum banyak penelitian yang berfokus pada satu periode yang menjadi titik penting perjalanan NU. Oleh karena itu hendaknya penelitian yang sama dengan peneliti tetap digalakkan dan tetap dilanjutkan.

Penelitian ini adalah bagian dari penelitian yang telah mengambil setting pada era 1952-1955 dimana NU pertama kali terlibat dalam urusan politik dan ikut langsung dalam perhelatan pemilu yang pertama. Penelitian ini menjadi unik dan sangat menarik, untuk itu hendaknya terus dilakukan berbagai upaya lain yang lebih serius mengenai pemikiran yang sama.

NU pada era 1952-1955 menjadi sangat menarik untuk dikaji karena keterlibatannya menjadi titik penting para ulama sebagai panutan umat Islam. Dengan demikian perlu ditindak lanjuti lagi penelitian yang sama agar kajiannya jauh lebih tajam dan lebih mampu mendapatkan kesimpulan yang mendalam.

Demikianlah hasil penelitian yang telah peneliti lakukan semoga memberikan banyak manfaat atas upaya akademik yang dilakukan oleh kalangan akademisi. Penulis yakin bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, untuk itu saran dan kritik serta oto-kritik patut ditindaklanjuti agar mampu menghasilkan penelitian yang lebih matang dan lebih memuaskan secara akademik.

Daftar Pustaka

Arsip dan Dokumen:

Surat Delegasi NU kepada Raja Saudi Arabia
 Surat Balasan dari Kerajaan Saudi Arabia untuk Jam'iyah NU
 Anggaran Dasar NU tentang Keharusan Bermadzhab bagi Anggota NU
 Anggaran Dasar NU Tahun 1926
 Anggaran Rumah Tangga NU Tahun 1926
 Anggaran Rumah Tangga Bagian Urusan Harta
 Anggaran Rumah Tangga Bagian Urusan Pekerjaan
 Anggaran Rumah Tangga Bagian Urusan Perusahaan dan Perniagaan
 Anggaran Dasar dan Rancangan Anggaran Rumah Tangga Waqfijah NU
 Maklumat tentang Utusan NU untuk Kongres Rakyat Indonesia
 Surat kepada Gubernur Hindia tentang Pembebasan Pajak Guru
 Surat kepada Direktur Keuangan Hindia Belanda yang dimuat Satu Media
 Surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengenai Beberapa Soal yang Dikemukakan oleh NU
 Resolusi NU tentang Jihad Fi Sabilillah Tahun 1945
 Piagam Liga Muslimin Indonesia
 Anggaran Dasar Partai NU
 Anggaran Rumah Tangga Partai NU
 Undang-undang 1948 No. 27 Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggauta-anggautanya.
 Undang-undang 1949 No. 12 Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang No. 27 mengenai susuna Dewan Perwakilan Rakyat dan pemilihan anggauta-anggautanya.

Buku-Buku:

Ahmad, Arifi. 2010. *Pergulatan Pemikiran Fiqih Tradisi Pola Madzhab*. Jogjakarta: Elsas.
 Abdul, Aziz. 2011. *Chiefdom Madinah. Salah Satu Paham Negara Islam*. Jakarta; pustakaAlfabeta.

Bruinessen, Martin Van. 2009. *NU, Tradisi, Relasi-relasi kuasa, pencarian wacana baru*. Yogyakarta : Lkis.
 Soelaiman, Fadel&M. Subhan. 2007. *Antologi NU; Sejarah, Istilah, Amaliyah, Uswah*. Surabaya : Khalista.
 Fealy, Greg. 2009. *Ijtihad Politik Ulama; Sejarah NU 1952-1967*. Jogjakarta: Lkis.
 Fealy, Greg dan Bubalo, Anthony. 2007. *Jejak Kafilah: Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Bandung: Mizan.
 Feillard, Andree. 2009. *NU vis a vis Negara; Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna*. Jokjakarta: Lkis..
 Ali, Haidar. 2011. *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia; Pendekatan Fikih dalam Politik*. Surabaya: Al-Maktabah.
 Laode, Ida 2004. *NU Muda; Kaum Progresif dan Sekulerisme Baru*. Jakarta: Erlangga.
 Lathiful, Khuluq. 2009. *Fajar kebangunan Ulama: Biografi KH. Hasyim Asy'ari*. Jogjakarta: Lkis.
 LBM PWNU Jawa Timur. 2013. *NU menjawab Problematika Umat: keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur (1991-2013)*. Pasuruan: BinaAswaja.
 LTN NU. 2007. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1924-2004)*. Surabaya: Khalista.
 Maksoem, Machfoedz. 1982. *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*. Surabaya: Yayasan Kesatuan Umat.
 Martin Van, Bruinessen. 2009. *NU, Tradisi, Relasi-relasi kuasa, pencarian wacana baru*. Lkis: Yogyakarta.
 Mujamil Qomar. *NU Liberal: dari Tradisionalisme Ahlussunnah waljama'ah ke Universalisme Islam*. Mizan: Bandung.
 Abdul Muchith, Muzadi. 2006. *NU dalam Perspektif sejarah dan ajaran*. Surabaya: Khalista.
 Nur Khalik, Ridlwan. 2010. *NU dan Bangsa 1914-2010; Pergulatan Politik dan Kekuasaan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
 A, Rubaidi. 2010. *Radikalisme Islam, NU dan masa depan moderatisme Islam di Indonesia*. Jogja: Logung
 Ayu, Sutarto. 2008. *Menjadi NU menjadi Indonesia: Pemikiran KH. Abdul Muchith Muzadi*. Surabaya: Khalista.
 Tim Aswaja NU Center, PWNU JATIM. 2012. *Risalah Ahlunnah Wal Jamaah*. Khalista: Surabaya.